

Kompetensi Pustakawan Menuju Perguruan Tinggi Bertaraf Internasional

Oleh:
Sri Rumani*)

Abstrak

Dalam masyarakat ilmu pengetahuan, perguruan tinggi sebagai media transfer ilmu dan kekuatan moral untuk menumbuhkan daya saing nasional. Oleh karena itu *world class university/WCU* dan *world class faculty/WCF* menjadi komitmen dan semangat para pimpinan perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian menjadi roh/jiwanya, yang dapat eksis bila ditopang oleh perpustakaan yang berfungsi sebagai “jantung” PT dan mempunyai kualitas pelayanan bertaraf dunia.

Salah satu indikator untuk mewujudkan perpustakaan bertaraf internasional adalah pustakawan yang kompeten baik secara profesional maupun individual. Kompetensi profesional dan individual wajib dimiliki oleh setiap pustakawan perguruan tinggi di Indonesia. UU No. 43 Tahun 2007 dan kode etik pustakawan menjadi landasan yuridis dan moral bagi pustakawan dalam melaksanakan kewajibannya. Pustakawan ideal memiliki kompetensi yang secara legal diberikan sertifikasi. Oleh karena itu sertifikat pustakawan (Serpus) dan konsekwensinya menjadi agenda yang tidak bisa ditunda lagi.

Kata Kunci: kompetensi pustakawan; perguruan tinggi bertaraf internasional

A. Latar Belakang

Peradaban manusia abad 21 telah masuk dalam era masyarakat belajar (*learning society*) atau masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*). Artinya untuk dapat bertahan dalam kehidupan yang cepat berubah ini harus mempunyai ilmu pengetahuan. Perguruan Tinggi sebagai wahana ideal untuk menciptakan masyarakat belajar karena sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi telah merubah kampus sebagai media transfer ilmu pengetahuan, bukan lagi sebagai “merana gading”. Penelitian menjadi “roh/jiwa” yang wajib dilaksanakan, karena perguruan tinggi diyakini menjadi kekuatan moral dalam menumbuhkan daya saing nasional.

Bertitik tolak dari pemikiran itulah muncul istilah “*world class university/WCU* dan *World class faculty/WCF*”. Istilah ini bukan latah tetapi menjadi keharusan karena tuntutan jaman yang selalu berubah. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum, telah membawa perubahan signifikan sistem pengelolaan perguruan tinggi. UGM, UI, ITB dan IPB sebagai “*pilot project*” dalam visinya telah menyatakan sebagai “universitas riset kelas dunia”, dengan misi umum melaksanakan pembelajaran dan pengabdian berbasis riset.

B. Perguruan Tinggi Bertaraf Internasional

Parameter perguruan tinggi bertaraf internasional menurut Rektor IPB pada wisuda ke-3 tahun akademik 2004/2005 di Graha Widya Wisuda, Bogor adalah:

Suatu perguruan tinggi dapat disebut bertaraf internasional syaratnya:

- 1) Jumlah dosen yang bergelar doktor harus lebih dari 75 %,
- 2) Persentase mahasiswa pascasarjana harus sama dengan atau lebih besar dari 75% dari total mahasiswanya,

*)Pustakawan Madya pada Universitas Gajah Mada

- 3) Publikasi internasional yang diterbitkan oleh setiap staf pengajar per tahun minimal dua publikasi di jurnal terakreditasi secara internasional
- 4) Besarnya dana untuk kegiatan riset untuk setiap staf lebih USD 1300 per tahun,
- 5) Jumlah mahasiswa asing di perguruan tinggi tersebut minimal 5%,
- 6) Koneksi internet minimal 15 Mb dengan koneksi Wifi. (Rita Komalasari, 2006).

Acuan indikator untuk mencapai universitas bertaraf internasional, menurut Asiaweek.com dalam Ratnaningsih (2008:12-14) dapat dilihat dalam Tabel 1:

Tabel 1. Acuan indikator untuk Mencapai Universitas Bertaraf internasional

<i>Criteria</i>	<i>Indicator</i>	<i>Code</i>	<i>Weight</i>
<i>Quality of Education</i>	<i>Alumni of an institution winning Nobel Prizes and Fields Medals</i>	Alumni	10%
<i>Quality of Faculty</i>	<i>Staff of an institution winning Nobel Prizes and Fields Medals</i>	Award	20%
	<i>Highly cited reaseachers in 21 broad subject catagories</i>	HiCi	20%
<i>Research Output</i>	<i>Articles published in Nature Science</i>	N & S	20%
	<i>Article in Science Citation Index-expanded and Social Science Citation index</i>	SCI	20%
<i>Size of Institution</i>	<i>Academic performance with respect to the size of an institution</i>	Size	10%
Total			100%

Dari 2 sumber tersebut, penelitian menjadi kata kunci yang tidak dapat ditawar lagi. Hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal ilmiah internasional dapat dijadikan referensi. Semakin banyak orang merujuk tulisannya untuk dijadikan acuan, semakin meningkatkan kredibilitas keilmuan penulis jurnal dan nama perguruan tinggi. Sayangnya berdasarkan statistik publikasi ilmiah tingkat internasional dari Indonesia hanya 0,012 persen. Dibandingkan Thailand 0,086 persen, Malaysia 0,64 persen, Singapura 0,179 persen, Filipina 0,035 persen. Sementara terbesar diduduki Negara USA 30,8 persen, Jepang 8,2 persen, UK 7,9 persen, Jerman 7,2 persen dan Perancis 5,6 persen (Khaerudin kurniawan dalam Santoso. 2006:6).

Untuk menjadi universitas bertaraf internasional tidak semudah membalik tangan. Perlu komitmen tinggi semua pihak (rektorat, dekanat dan tenaga kependidikan/pustakawan, laboran, staf administrasi). Pembinaan SDM dan infrastruktur yang memenuhi standar internasional harus dilakukan. Salah satu unsur penunjang yang perlu mendapat perhatian serius adalah perpustakaan. Pasal 35 ayat 1 Bab XI UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengatakan:” perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, selain laboratorium bengkel kerja, dan ruang belajar”.

Perpustakaan sebagai unsur penunjang, mempunyai fungsi edukatif, informatif, riset, rekreatif, administratif, publikasi, deposit, interpretasi (Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi (2004) dalam

Luki Wijayanti (2006:7-8). Komitmen perguruan tinggi bertaraf internasional sebagai harapan, peluang dan tantangan menuju perpustakaan bertaraf internasional. Fungsi perpustakaan yang strategis dan penting ini sampai disebut “jantungnya perguruan tinggi”. Jantung ini dapat berfungsi baik bila koleksi, pelayanan, SDM, anggaran, sarana dan prasarana mendapat perhatian pimpinan perguruan tinggi.

Landasan yuridis perpustakaan perguruan tinggi UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pasal 24 ayat 1-4, intinya setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional, koleksinya untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pelayanannya berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta mengalokasikan dana sesuai dengan standar nasional. Masalah dana ini dalam RUU secara nominal disebutkan minimal 5 persen, kenyataannya UU No. 43 Tahun 2007 angka 5 persen tidak muncul, sehingga pasal ini dapat menjadi pasal “karet”, dalam penafsirannya. Pimpinan bisa mengatakan tidak ada dasar hukumnya untuk mengalokasikan 5 persen, atau sudah banyak perguruan tinggi yang anggaran perpustakaan lebih dari 5 persen.

C. Perpustakaan Bertaraf Internasional

Parameter perpustakaan bertaraf internasional, menurut Luki Wijayanti dan Yooke Tjuparmah dalam Ratnaningsih (2008:12-14) menyatakan:

Jumlah koleksi lebih 1.000.00 judul, *data base* yang dilanggan lebih 300, memiliki akses *e-book* lebih 10.000 judul, pengadaan buku per tahun minimum 100.000 eksemplar, menyimpan seluruh karya sivitas akademika lebih 90 persen, layanan per minggu 80 jam waktu Senin s/d Minggu, ada penelusuran informasi oleh 4 orang pakar (S3) dan 4 orang *resource person* (S2), mengadakan pelatihan, jumlah komputer 1:10, tempat duduk 1:90, ruang khusus untuk mahasiswa S2 dan peneliti 25 ruang, ruang diskusi 10 buah, *bandwidth* lebih 30 Mbps, pustakawan sarjana rata-rata 40 persen dari total staf, magister rata-rata 30 persen dari total staf, doktor rata-rata 10 persen dari total staf, dana untuk pembelian bahan pustaka rata-rata 25 milyar rupiah, untuk pembelian buku 20 milyar rupiah, langganan informasi elektronik 6 milyar rupiah, operasional 5 milyar rupiah dan menjadi anggota jaringan kerja sama internasional secara aktif.

1. Sumber Daya Manusia Perpustakaan

Sumber daya manusia sebagai salah satu parameter menuju perpustakaan bertaraf internasional, syaratnya harus ada pakar (S3), dan *resource person* (S2) minimum 4 orang. Secara tegas disebutkan pustakawan sarjana rata-rata 40 persen, magister 30 persen, dan dokter 10 persen. Andaikan dalam satu universitas di perpustakaan ada 100 orang SDM, maka komposisinya pustakawan 40 orang (S1), 30 orang (S2), dan 10 orang (S3), ditambah 4 pakar (S3) dan 4 orang dengan keterampilan khusus (S2).

Di Indonesia belum ada perpustakaan yang bisa memenuhi parameter SDM tersebut. Namun semangat dan komitmen menuju kearah kualitas dunia sudah menjadi modal utama. Pustakawan mempunyai peran strategis, sebagai aset intelektual dapat melakukan kolaborasi dengan subyek spesialis, teknologi informasi, ahli manajemen, komunikasi, hukum, akuntan. Saat ini pembenahan dan perubahan terus dilakukan dengan memberikan beasiswa studi lanjut didalam negeri dan di luar negeri. Indonesia belum mempunyai pustakawan bergelar doctor (S3), sedang untuk magister (S2) ada 173 (5,87 persen) dari keseluruhan pustakawan. Berarti ada potensi untuk mempunyai pustakawan doctor

manakala yang sudah S2 mendapatkan beasiswa melanjutkan studi S3. Namun ada juga S2, tetapi sudah tidak aktif sebagai pustakawan karena pindah jalur struktural atau menjelang pensiun.

Menurut Sri Mamuji (2000:2), di perpustakaan memiliki 4 (empat) kelompok sumber daya manusia yaitu pustakawan yang berijazah sarjana ilmu perpustakaan, tenaga fungsional yang melaksanakan keahlian diluar puskodinfo, tenaga administrasi dan tenaga ahli subjek (sarjana dari bidang lain). Pustakawan menjadi “primadona” untuk mewujudkan perguruan tinggi berkelas dunia. Bukan sekedar isapan jempol kalau profesi ini kedepannya sangat menjanjikan dan dilirik banyak orang, dan menjanjikan kesejahteraan secara finansial karena “kaya informasi” yang bisa menjadi sumber ide untuk “dituangkan dan diuangkan”.

2. Landasan Yuridis dan Landasan Moral

a. Landasan Yuridis

Pustakawan di Indonesia secara yuridis sudah diakui pemerintah sejak tahun 1988 (Kepmenpan No. 18 Tahun 1988), dan usia pensiunnya diperpanjang sampai 65 tahun bagi golongan IV/d-IV/e (Keppres No. 62 Tahun 1992). Konsekwensinya selain tunjangan fungsional, untuk naik pangkat mengumpulkan angka kredit yang besarnya sama dengan fungsional lainnya (dosen,peneliti). Namun nilai angka kreditnya sangat kecil (0,0002 sampai 12,5). Sedang besarnya tunjangan menurut Keppres No. 65/1992 Rp. 22.500,- (II/b), tertinggi Rp. 110.000,- (IV/e), terakhir menurut Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2007 sebesar Rp. 240.000,- (II/b) s/d Rp. 700.000,- (IV/e).

b. Landasan Moral

Landasan moral pustakawan adalah Kode Etik Pustakawan Indonesia, sebagai panduan perilaku dan kinerja dalam melaksanakan tugas dibidang kepustakawanan. Tujuan kode etik ini untuk membina dan membentuk karakter pustakawan, mengawasi tingkah laku dan sarana sosial kontrol, mencegah timbulnya konflik, menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan mengangkat citra pustakawan.

Dalam kode etik pustakawan harus memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat, *mempertahan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan wajib mengikuti perkembangan*, dapat membedakan pandangan hidup pribadi dan tugas profesi, keputusannya secara profesional, tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan, dan bersifat sopan, bijaksana dalam melayani masyarakat baik ucapan maupun perbuatan.

3. Kondisi Riil di Indonesia

Data dari Perpustakaan (2009) jumlah pustakawan ada 2949 orang. Dari jumlah itu yang berkerja di perpustakaan perguruan tinggi ada 1313 orang (44,53 persen). Jumlah ini termasuk yang paling banyak bila dibandingkan dengan pustakawan yang ada di perpustakaan RI 154 orang (5,22 persen), di perpustakaan provinsi 704 orang (23,87 persen), diperpustakaan umum 103 orang (3,49 persen), di perpustakaan khusus 475 (16,11 persen), perpustakaan sekolah 200 orang (6,78 persen).

Disisi lain pustakawan saat inipun lebih dari 90 persen karena penyesuaian (*inpassing*), bukan dengan ijazah ilmu perpustakaan. Akibatnya pustakawanan stagnan, tidak produktif, monoton, apatis, dan “gagap teknologi”, mempertahankan kemapanan dan alergi perubahan. Prediksinya, 5 tahun kedepan pustakawan “*inpassing*” ini sudah memasuki pensiun dan digantikan pustakawan yang muda semangat, punya daya jaung, kreatif, inovatif, energik.

D. Kompetensi Pustakawan

Komitmen dan semangat untuk menuju perguruan tinggi bertaraf internasional dilandasi oleh perpustakaan yang berkelas dunia, baik secara kualitas maupun kuantitas. SDM merupakan komponen yang signifikan dalam mencapai terwujudnya komitmen dan semangat perpustakaan yang mendunia. Kompetensi menjadi kata kunci yang perlu dipikirkan serius, komprehensif, dan berkelanjutan, supaya tidak terjadi stagnasi profesi dan karier pustakawan.

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya. Intinya kompetensi sebagai tolok ukur untuk mengetahui kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan dan keahliannya. Pustakawan sebagai tenaga profesional yang kompeten dengan kualifikasi akademik dan non akademik, yang dilegalkan dengan bukti sertifikat. Perlu dipikirkan sertifikat pustakawan (Serpus).

Dalam UU No. 43 Tahun 2007, pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, yang tugasnya melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Kewajiban pemerintah untuk membina dan mengembangkan kompetensi profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis lainnya (pasal 7 ayat 1 huruf h). Untuk pustakawan belum ada pedoman yang dijadikan acuan, siapa yang berhak menguji kompetensi, apa indikatornya, dan lembaga mana yang mengeluarkan sertifikat. Kompetensi pustakawan yang dibuktikan dengan sertifikat perlu dimiliki oleh para lulusan D3, S1, S2 sebagai prasyarat untuk memasuki dunia kerja (SIK/Surat Ijin Kerja). Sertifikat kompetensi berlakunya dibatasi hanya 5 tahun, yang harus diuji lagi setelah 5 tahun.

1. Kompetensi Profesional

Menurut *US Special Library Associations* dalam Titek Kismiyati (2006:3-4), Kompetensi profesional terkait dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen penelitian, dan kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi.

2. Kompetensi Individual

Kompetensi individual menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dapat memperlihatkan nilai lebihnya, serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia kerjanya.

3. Pustakawan Ideal Yang Dibutuhkan

Pustakawan ideal adalah yang mempunyai kompetensi profesional dan individual. Kondisi ini untuk mengimbangi tuntutan pemustaka akibat perkembangan teknologi, perubahan paradigma pelayanan yang tidak lagi berorientasi proses, tetapi kebutuhan pemustaka. Dari paradigma koleksi berubah ke paradigma komputer dengan jaringan internet. Kepuasan pemustaka menjadi tujuan pustakawan yang kompeten secara profesional dan individual. Berikut kompetensi profesional yang dibutuhkan pustakawan adalah:

- a. Mempunyai pengetahuan kepustakawanan dan informasi, mengetahui sumber-sumber informasi dan memilih secara tepat serta memberikan pelayanan teknis pusedukinfo.
- b. Membangun, mengembangkan dan mengelola layanan informasi sehingga mudah diakses, efektif dan efisien.
- c. Secara periodik melakukan bimbingan pemakaian untuk civitas akademika, yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

- d. Melakukan penelitian tentang keinginan pemustaka, layanan informasi, dan produk jasa yang dikembangkan, dan manajemen perpustakaan.
- e. Mampu memanfaatkan teknologi untuk kelancaran pelayanan, pengadaan, dan penyebaran informasi.
- f. Menguasai subjek spesifik (hukum, politik, farmasi, ekonomi, kedokteran, dll) disamping subyek umum dalam ilmu pengetahuan.
- g. Menguasai bahasa asing dan teknologi informasi untuk menjalin kerjasama lintas Negara, dan mengikuti perkembangan perpustakaan.
- h. Memahami *software* (program), untuk perpustakaan khususnya yang *open source*, yang murah tetapi fleksibel.
- i. Mampu mengidentifikasi produk layanan perpustakaan dan membuat SOP (*standard operating procedure*).
- j. Menguasai manajemen koleksi-koleksi, manajemen keuangan, manajemen waktu, manajemen konflik dan manajemen sumberdaya manusia.
- k. Memiliki kemampuan membuat proposal, anggaran, laporan, evaluasi, menyusun RKAT.
- l. Mampu membuat program pelatihan, *workshop*, penelusuran informasi, penulisan karya ilmiah, memanfaatkan *e-jurnal*, *e-book*, *library 2.0*, *Web 2.0*, *Librarian 2.0*, *Wikipedia*, *blog*, *facebook*, *twintter*, *friendster*, PLO.

Sedang kompetensi individual yang dibutuhkan adalah:

- a. Mempunyai kemampuan, kemauan, dan kesempatan untuk menuangkan ide kreatifnya dalam buku, jurnal, majalah, media massa.
- b. Mampu berkomunikasi efektif (lisan dan tertulis, cetak dan maya, vertikal dan horisontal), mempunyai jiwa kepemimpinan.
- c. Dapat berkerja dalam tim, melakukan koordinasi, maupun kerja mandiri, dan semangat dan komitmen tinggi untuk mengembangkan pelayanan.
- d. Penampilan menarik (tidak *overacting*), cerdas (IQ, EQ, SQ), responsif, cekatan dalam bertindak, luwes, jujur, ikhlas, dalam bekerja, tidak sombong, rendah hati (bukan rendah diri), ramah, murah senyum.

E. Penutup

Komitmen dan semangat mewujudkan perguruan tinggi bertaraf internasional diiringi oleh tersedianya perpustakaan kelas dunia. Pustakawan yang kompeten secara profesional dan individual menjadi kunci utamanya. Syarat pendidikan sarjana, magister, dan doktor ilmu perpustakaan dan informasi harus dimiliki oleh pustakawan perguruan tinggi bertaraf internasional.

Untuk itu perlu dipikirkan pemberian beasiswa pustakawan yang sudah S1 ke S2, yang S2 ke jenjang S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Juga perlu ada sertifikat bagi pustakawan (Serpus), yang nantinya dapat berimbas pada peningkatan kinerja (bagi lembaga) dan kesejahteraan (bagi pustakawan).

Daftar Pustaka

- <http://pustakawan.pnri.go.id>. 2009. *Pustakawan Berdasarkan Jenis Instansi* Diakses tanggal 20 Juli pukul 11.45 wib.
- Indonesia. 2007. Undang-undang No. 43 Tahun 2007 *tentang Perpustakaan*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Khaerudin Kurniawan dalam Santoso. 2006. *Transformasi Perguruan Tinggi Menuju Indonesia Baru*. www.DEPDIKNAS.go.id. Diakses tanggal 24 April pukul 12.00.
- Kismiyati, Titi. 2006. *Standar Kompetensi Pustakawan*. Media Pustakawan, Vol. 13 (No. 1 dan 2) Juni h.3-4.
- Komalasari, Rita. 2006. <http://bpib-opini.blogspot.com/2006/10/peran-dan-kompetensi-pustakawan-dalam.html> diakses tgl 20/7/09 pukul 12.10.
- Mamuji, Sri. 2000. *Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui pendidikan dan pelatihan*. Makalah Pertemuan Berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ke-X. Yogyakarta: 25-27 Juli.
- Priyanto, Ida Priyanto. 2008. *Tantangan Baru Dunia Kepustakawanan: Menuju Masa Depan Yang Berubah*. Makalah kuliah umum di UIN.
- Ratnaningsih. 2008. *Menuju Perpustakaan Perguruan Tinggi Berkelas Dunia*. Naskah Pidato Pengukuhan Pustakawan Utama. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Sudarsono, Blasius. 2005. *Membangun Kemampuan Pustakawan*. Makalah Temu Kerja Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama Se Indonesia. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Wijayanti, Luki. 2006. *Reengineering (Penataan Ulang) Profesi Pustakawan: Sertifikasi dan uji kompetensi profesi pustakawan perpustakaan perguruan tinggi*. Media Pustakawan, Vol. 13 (No. 1 dan 2) Juni h.7-8.